



Analisis Kebijakan Pemerintahan Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur dalam Memberdayakan Masyarakat

Melly Diasti, Yosi Fahdillah

Universitas Dinamika Bangsa

yosifadillah023@gmail.com

Abstract

The research took place in Baru the Village of Sungai Medang districts Air Hangat Timur Kerinci Regency. The purpose of this research is to know the policy of Baru Village Government of Sungai Medang in Empowering Society. The approaches techniques used in the research is qualitative. The informants amounted to 10 people. The techniques and data collection tools in the study are interviews, observation, documentation. The data collection tools in the form of a list of questions, pens, books/papers. The unit of analysis is the individual government in empowering the community in Baru village Sungai Medang districts Air Hangat Timur. The results of the research shows that the analysis of village government policy of Sungai Medang District Air Hangat Timur in empowering society has been running maximally. In running the policy has been going well with the help of the community in conducting deliberation. The formulation of the policy goes according to the procedure and there are many policies that the Village Government wants to implement but there are so many obstacles that make the policy not yet implemented, it shows that the Village Government is trying to implement the Policies in Empowering the Villages but not all goes according to their wish as well as time, seeing from the Community Empowerment that has been applied to help the economy of the village community, therefore Empowerment should be done gradually so that the results of Community Empowerment Policy in Baru Village Sungai Medang can be seen.

Keywords: Empowering, Policy, Village Government

Abstrak

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Tujuan penelitian untuk mengetahui Kebijakan Pemerintahan Desa Baru Sungai Medang Dalam Memberdayakan Masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun informan berjumlah 10 orang. Teknik dan alat Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan, pena, buku/kertas. Unit analisis adalah individu pemerintah dalam memberdayakan masyarakat di Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur. Hasil penelitian menunjukkan Analisis Kebijakan Pemerintahan Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air hangat Timur Dalam Memberdayakan Masyarakat sudah berjalan secara maksimal. Dalam menjalankan kebijakan sudah berjalan dengan baik dengan bantuan masyarakat dalam melakukan musyawarah. Merumuskan kebijakan berjalan sesuai dengan prosedur dan ada banyak kebijakan yang ingin diterapkan Pemerintah Desa namun ada begitu banyak kendala yang membuat kebijakan belum dilaksanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa berupaya menerapkan Kebijakan dalam Memberdayakan Masyarakat Desa namun tidak semua berjalan sesuai keinginan mereka karena memerlukan proses dan juga waktu, melihat dari Pemberdayaan Masyarakat yang sudah di terapkan dapat membantu perekonomian masyarakat desa, maka dari itu Pemberdayaan harus dilakukan secara bertahap supaya hasil dari Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Baru Sungai Medang dapat terlihat.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemberdayaan, Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang demokrasi. Demokrasi pada hakekatnya merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Salah satu wujud dari penerapan demokrasi di Indonesia saat ini adalah pemberian hak sekaligus wewenang otonomi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam hal penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah-daerah yang secara geografis jauh dari pemerintahan pusat dapat mewujudkan

kesejahteraan masyarakat secara cepat dan merata, dalam hal mencapai tujuan dan cita-cita negara republik Indonesia.

Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan meningkatkan kekuasaan kepada masyarakat yang kurang beruntung secara berkesinambungan, dinamis, serta berupaya untuk membangun daya itu untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat agar ikut serta terlibat dalam mengelola semua potensi yang ada secara evolutif.

Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada pihak yang tak berdaya (masyarakat miskin), supaya dapat memiliki kekuatan untuk membangun, serta meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk membangun. Masyarakat miskin memiliki ciri ketidakberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Potensi manusia yang nantinya ditunjukkan dalam aspek yang salah satunya adalah kualitas, hanya dapat dicapai dengan adanya pengembangan sumber daya manusia. Hal tersebut diperlukan karena sumber daya manusia merupakan faktor yang paling mempengaruhi kehidupan. Kemampuan manusia untuk mempengaruhi alamnya menunjukkan bahwa posisi SDM sangat sentral adanya. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang ada hendaklah dikembangkan sedemikian rupa guna mencapai kesejahteraan.

Desa sebagai unit Pemerintah Daerah paling bawah merupakan instansi yang secara langsung melayani masyarakat yang dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk lebih profesional di dalam memberikan berbagai pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kepala Desa sebagai aparat Pemerintah selaku Abdi Negara dan masyarakat, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut kepentingan umum.

Pedesaan merupakan penopang ekonomi perkotaan. Jika pemberdayaan dalam hal ini pengembangan SDM di pedesaan dibangun dan diorganisasi serta diberi pendidikan dan pelatihan yang baik, bukan tidak mungkin akan berkembang seperti SDM yang berada di perkotaan dimana mereka dapat menguasai teknologi. Sehingga diharapkan jika SDM baik di perkotaan maupun pedesaan dapat berkembang dengan pesat dan baik, maka Negara Indonesia yang termasuk dalam lima besar negara berpenduduk terbesar di dunia akan maju dan menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Sebagian besar pedesaan di Indonesia boleh dikatakan memiliki sumber daya alam yang melimpah namun dikarenakan kurangnya pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa membuat kualitas SDM dan rendah nya pendidikan formal bahkan banyak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar menjadi pengangguran. Adapun fenomena-fenomena yang terjadi di Desa Baru Sungai Medang adalah (1) banyaknya sumber daya manusia yang masih belum terberdayakan; (2) tidak adanya pemerataan dalam penerapan kebijakan pemberdayaan, (3) pengetahuan/pemahaman masyarakat yang masih relatif rendah terhadap kebijakan pemberdayaan masyarakat karena tidak ada sosialisasi terhadap masyarakat desa, dan (4) minimnya kebijakan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Pemimpin atau Kepala Desa adalah kunci dari keberhasilan dan suksesnya suatu desa. Kepemimpinan yang baik di yakini mampu mengikat, mengharmonisasikan serta mengambil kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat. Sikap profesionalitas pemimpin dalam pekerjaan dapat membantu seseorang menjadi pribadi yang dapat diandalkan, ini lah yang menjadi salah satu persoalan yang terjadi di Desa Baru Sungai Medang, lemahnya sumber daya manusia karena kurangnya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan desa membuat desa jauh tertinggal dengan desa lainnya.

Dengan demikian, atas dasar pentingnya memberdayakan masyarakat desa agar menjadi desa yang maju dan dikaitkan dengan masalah-masalah yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kebijakan pemerintah desa dalam mengatasi masalah tersebut, dengan judul "Analisis Kebijakan Pemerintahan Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur dalam Memberdayakan Masyarakat."

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam Winarno (2014:20), Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi masalah atau suatu persoalan. Sedangkan menurut Friedrik dalam Winarno (2014:20), Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan.

Menurut Robert Eyestone dalam Leo Agustino (2006:6), mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Kemudian menurut Budi Winarno (2014 :21), satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Hal ini karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai. Oleh karena itu definisi kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut Suhendra (2006:74-75), adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”. Selanjutnya pemberdayaan menurut Ife dalam Suhendra (2006:77), adalah “meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (empowerment aims to increase the power of disadvantage)”.

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan), karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan niat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol.

Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan senantiasa tercipta dan hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti itu, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna.

Menurut Mardikanto (2014:202), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Perbaikan kelembagaan (better institution). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
2. Perbaikan usaha (better business). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnisilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
3. Perbaikan pendapatan (better income) . Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
4. Perbaikan lingkungan (better environment). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. Perbaikan kehidupan (better living). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. Perbaikan masyarakat (better community). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sosial, yaitu tradisional, direct action (aksi langsung), dan transformasi yang dijelaskan sebagai berikut (Hikmat, 2006) yaitu :

1. Strategi tradisional. Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.

2. Strategi direct-action. Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.
3. Strategi transformatif. Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

Dalam penelitian ini agar dapat terarah dan untuk menghindari kesalahan penafsiran istilah dalam indikator yang digunakan yaitu Analisis Kebijakan Pemerintahan Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur Dalam Memberdayakan Masyarakat. Menurut William Dun yang di kutip dari buku Budi Winarno (2012:35), Adapun Tahap-tahap Kebijakan, adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda
Para pejabat yang dipilih atau diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
2. Formulasi kebijakan
Masalah yang telah masuk agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives / policy options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
3. Adopsi kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Implementasi kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah.
5. Evaluasi kebijakan
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteri-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2003:14) pendekatan kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Alasan menggunakan pendekatan studi kasus pada penelitian ini dikarenakan dengan menggunakan pendekatan tersebut, peneliti dapat mengetahui Bagaimanakah Analisis Kebijakan Pemerintahan Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur Dalam Memberdayakan Masyarakat.

- Dalam penelitian ini peneliti memilih informan secara purposive sampling yang sesuai dengan kriteria:
- Subjek yang menguasai atau memahami sesuatu mulai proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga di hayati.
- Subjek yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah di teliti.
- Subjek yang mempunyai waktu yang memadai untuk di mintai informasi
- Subjek yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.

Sedangkan untuk key Informan yang ditetapkan oleh peneliti yaitu Kepala Desa, Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur, yang mengetahui permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan informan biasa adalah yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini penulis memakai teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian dapat dijelaskan secara terpisah dengan pembahasan maupun digabung menjadi satu bagian. Apabila terdapat gambar dalam artikel jurnal maka penulisan judul gambar berada di bawah gambar dengan memberikan nomor dan keterangan gambar

Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda kebijakan diawali dari suatu masalah yang muncul di masyarakat. Masalah ini dapat diungkapkan oleh seseorang sebagai masalah pribadi kemudian berkembang menjadi masalah publik, masalah publik diartikan sebagai masalah yang mempunyai akibat yang luas, termasuk akibat-akibat mengenai orang-orang yang terlibat secara tidak langsung. Ada beberapa kriteria isu/masalah yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik salah satunya adalah telah mencapai titik kriteria tertentu yang bila diabaikan menjadi ancaman yang serius, dan juga mendapat dukungan dari masyarakat.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kaur Pemerintahan, bahwa Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Ketika diwawancara oleh Peneliti, beliau menyampaikan:

“Dalam menyusun agenda kebijakan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Baru Sungai Medang selalu menampung segala bentuk solusi dan saran dari yang di sampaikan masyarakat melalui BPD untuk selanjutnya kami adakan pertemuan untuk membahas lebih lanjut, sejauh ini proses penyusunan agenda berjalan sesuai harapan kami”.

Wawancara diatas menunjukkan bahwa BPD berperan penting dalam menyusun agenda kebijakan dan yang terpenting adalah menyesuaikan dengan anggaran yang ditetapkan yang kemudian ditambahkan lagi oleh Kadus Beringin Jaya, ketika diwawancara beliau mengatakan :

“Penyusunan agenda program Pemberdayaan Masyarakat berjalan dengan baik sesuai prosedur, hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam program tersebut, kami, Pemerintah Desa Baru Sungai Medang memang selalu melibatkan masyarakat dalam penyusunan agenda kebijakan”.

Menanggapi pernyataan informan di atas, salah satu masyarakat mengatakan hal yang senada bahwa :

“Penyusunan agenda nya memang sudah cukup baik karena Pemerintah Desa Baru Sungai Medang melibatkan masyarakat dalam penyusunan agenda, itu terbukti setiap apa yang kami utarakan/ inginkan selalu dipertimbangkan oleh Pemdes”.

Kemudian salah seorang warga lainnya, ketika di wawancara oleh peneliti beliau tampak tidak terlalu setuju dengan pendapat informan yang lain dan beliau menyampaikan pendapatnya dengan mengatakan :

“Sistem yang berjalan sampai saat ini cukup baik, namun tidak terlalu memuaskan masyarakat Desa Baru Sungai Medang karena masih ada program Pemberdayaan yang belum terealisasi”.

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, Kaur Kemasyarakatan ketika diwawancara oleh peneliti, beliau menegaskan:

“ Sistem penyusunan agenda sejauh ini sangat baik, Dalam menyusun agenda kebijakan pemberdayaan masyarakat, selalu diadakan rapat bersama para tokoh-tokoh masyarakat, dimana saat rapat, BPD mengambil alih rapat kemudian menyampaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan desa”.

Berdasarkan pengamatan peneliti dan juga sesuai dengan wawancara di atas menunjukkan bahwa pendapat masyarakat dan juga perangkat desa itu berbeda-beda dan pada intinya pemerintah desa harus lebih baik lagi dalam membangun kepercayaan masyarakat. Kemudian di tambahkan oleh Sekretaris Desa, ketika di wawancara oleh peneliti beliau menyampaikan:

“Pemerintah Desa Baru Sungai Medang menyusun agenda Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat agar masalah yang tidak terjangkau oleh kami dapat tersampaikan dan menyesuaikan dengan sistem yang ada”. “Penetapan anggaran untuk kebijakan pemberdayaan masyarakat Desa Baru Sungai Medang termasuk dalam penyusunan agenda”.

Hal senada di sampaikan oleh Kadus Tanjung Karang, ketika diwawancara oleh peneliti beliau menyampaikan: “Penyusunan agenda dilakukan agar kebijakan pemberdayaan masyarakat yang akan di bahas menjadi lebih mudah, Pemerintah Desa Baru Sungai Medang bekerja sama dengan masyarakat dalam menyusun agenda agar lebih efektif dan sistem yang terapkan pemerintah dalam menyusun agenda sudah cukup baik”. “Yang paling diutamakan yaitu menetapkan anggaran untuk kebijakan pemberdayaan masyarakat”.

Lebih lanjut, seorang masyarakat Desa Baru Sungai Medang, menyampaikan pendapatnya dengan baik: “Penyusunan agenda kebijakan pemberdayaan masyarakat Desa Baru Sungai Medang harus dilakukan dengan benar supaya dalam merumuskan kebijakan dapat dilakukan dengan mudah, partisipasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sangat diperlukan agar masalah yang ada dapat masuk dalam agenda kebijakan”. “Yang termasuk penyusunan agenda berupa penetapan anggaran. Pembangunan desa dan lain sebagainya, termasuk masalah-masalah yang akan di bahas”.

Kemudian Ibu selaku masyarakat Desa Baru Sungai Medang juga menambahkan: “Agenda kebijakan pemberdayaan masyarakat disusun cukup baik oleh Pemerintah Desa Baru Sungai Medang, dalam hal ini masyarakat punya peran penting dalam penyusunan agenda”. “Yang masuk dalam penyusunan agenda salah satunya adalah masalah-masalah yang dilaporkan masyarakat pada BPD”.

Menanggapi semua jawaban dari informan diatas, dipertegas oleh *key informan* (Kepala Desa), beliau menyampaikan :

“Penyusunan agenda kebijakan pemberdayaan masyarakat di Desa Baru Sungai Medang berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dari pemerintah, dimana masyarakat dan desa bekerja sama dalam perumusan kebijakan”. “Penyusunan agenda kebijakan Pemberdayaan Masyarakat berupa penetapan anggaran, mengumpulkan masalah-masalah dikalangan masyarakat yang disampaikan kepala BPD”.

Berdasarkan pengamatan peneliti dan juga uraian di atas hasil wawancara dengan informan, menurut analisis peneliti bahwa indikator Penyusunan Agenda, sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, dimana masyarakat Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur ikut berpartisipasi dalam menyusun agenda kebijakan, masalah-masalah yang disampaikan masyarakat kepada BPD di tindak lanjuti untuk masuk kedalam agenda kebijakan, namun masih belum memuaskan masyarakat karena masih ada kebijakan yang belum terealisasi. Dalam penyusunan agenda kebijakan pemberdayaan masyarakat Pemerintah Desa Baru Sungai Medang harus menetapkan anggaran supaya perumusan kebijakan dapat dilakukan.

Formulasi Kebijakan

Hal terpenting dalam proses kebijakan ialah formulasi, dan hal dasar yang perlu dipelajari dalam proses ini adalah bagaimana para analisis kebijakan dapat mengenal masalah-masalah yang ada dikalangan masyarakat. Permasalahan publik merupakan pondasi dasar dalam merumuskan kebijakan publik agar arahnya tepat sasaran karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai. Oleh karena itu proses perumusan kebijakan ini yang bertanggung jawab ialah proses yang melibatkan interaksi antara pemerintah desa dengan tokoh-tokoh masyarakat dan juga masyarakat sebagai orang yang menerima kebijakan.

Hal ini Sesuai yang disampaikan oleh Kaur Pemerintahan Desa Baru Sungai Medang, ketika diwawancara beliau menyampaikan :

“Dalam perumusan kebijakan, kami Pemerintah Desa Baru Sungai Medang mencari tahu lebih dulu apakah masalah-masalah yang disampaikan masyarakat sesuai dengan keadaan setelah itu kami

bersama-sama mencari jalan keluar”. Sudah pernah dilakukan. Salah satunya di bidang pemberdayaan yaitu pelatihan tata boga”.

Kemudian ditambah lagi oleh seorang masyarakat mengatakan :

“Pemerintah Desa Baru Sungai Medang membentuk kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Pemdes bersama tokoh masyarakat bermusyawarah dalam membentuk kebijakan seperti apa yang ingin diterapkan”. “Sudah pernah dilakukan, namun tidak berjalan sesuai yang diharapkan contohnya dalam pelatihan tata boga yang belum menemui titik terang sampai sekarang”.

Hal senada disampaikan oleh seorang ibu selaku masyarakat desa, menyampaikan:

“Dalam pembentukan kebijakan program pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa Baru Sungai Medang menerapkan sistem pengambilan keputusan bersama masyarakat desa”. “Formulasi Sudah dilakukan, tetapi belum mencakup keseluruhan, contoh formulasi yang dilakukan yaitu mencari bahan/bibit yang berkualitas dalam memberdayakan masyarakat tani”.

Hasil pengamatan peneliti dan juga wawancara di atas bahwa dalam rangka merumuskan kebijakan penulis melihat pemerintah desa memang benar melibatkan masyarakat, hal ini menunjukkan dalam merumuskan kebijakan Pemerintah desa sudah cukup baik. Dan juga Sesuai dengan hasil wawancara di atas dipertegas oleh Kadus Beringin Jaya ketika diwawancara, beliau menyampaikan :

“Membentuk kebijakan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa Baru Sungai Medang selalu mengevaluasi dan mengkaji masalah yang ada untuk melihat tingkat kepentingan kebijakan”. “Pemerintah Desa Baru Sungai Medang sudah beberapa kali memformulasikan kebijakan salah satunya membuka turnamen sepak bola untuk memberdayakan pemuda desa”.

Hal yang sama Kemudian ditambahkan oleh Sekretaris Desa, ketika diwawancara beliau mengatakan :

“Dalam membentuk kebijakan pemberdayaan masyarakat harus lah di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa Baru Sungai Medang ”. “Formulasi sudah pernah dilakukan, yaitu perumusan program tata boga dan tata rias”.

Kemudian ditambahkan oleh Kaur Kemasyarakatan, ketika diwawancara beliau mengatakan:

“Dalam pembentukan kebijakan pemberdayaan masyarakat di Desa Baru Sungai Medang sudah cukup baik dengan melibatkan masyarakat dalam pembentukan tersebut”. “Ada beberapa formulasi yang sudah dilakukan seperti membentuk karakter pemuda pemudi dalam organisasi kemasyarakatan karang taruna Desa Baru Sungai Medang ”.

Lalu ditambahkan lagi oleh Kadus Tanjung Karang, ketika diwawancara beliau menyampaikan:

“Pembentukan kebijakan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat, pembentukan kebijakan pemberdayaan masyarakat ini membahas masalah-masalah yang terjadi di masyarakat lalu kami Pemerintah Desa Baru Sungai Medang bersama sama mencari jalan keluarnya”. “Kami Pemerintah Desa Baru Sungai Medang sudah pernah melakukan formulasi, salah satunya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan lansia”.

Selanjutnya peneliti menemui informan lain dari masyarakat:

“dalam Melaksanakan pembentukan kebijakan pemberdayaan masyarakat di Desa Baru Sungai Medang cukup mudah, salah satunya harus kesepakatan bersama dan juga kepetingan kebijakan itu sendiri”. “Pemdes Sudah pernah memformulasi kebijakan, namun belum optimal karena masih banyak yang belum terealisasi, misalnya pemberdayaan dalam bidang keagamaan”.

Berdasarkan pengamatan peneliti dan pendapat beberapa masyarakat, bahwa perumusan kebijakan yang berjalan sejauh ini cukup baik , hanya saja sering terjadi terkendala saat proses penerapannya. Kemudian ditambahkan lagi oleh informan lain dari masyarakat desa:

“Dalam membentuk kebijakan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa Baru Sungai Medang menerima solusi atau saran dari masyarakat”. “Formulasi kebijakan pemberdayaan masyarakat Desa Baru Sungai Medang sudah pernah dilakukan, seperti pelatihan tata boga”.

Selanjutnya, Munardi, Kepala Desa, ketika diwawancara beliau menegaskan :

“Membentuk kebijakan pemberdayaan masyarakat di Desa Baru Sungai Medang kami mengkaji berdasarkan masalah-masalah yang ada, masalah tersebut akan di musyawarahkan bersama perangkat desa dan juga perwakilan masyarakat untuk kemudian dicari pemecahan masalahnya”. “Formulasi Sudah pernah kami lakukan, seperti pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan maupun pertanian”.

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas dan pengamatan di lapangan maka dapat peneliti simpulkan bahwa dalam Formulasi Kebijakan, Pemerintah Desa Baru Sungai Medang membentuk kebijakan pemberdayaan masyarakat berdasarkan masalah-masalah yang ada, mereka mengkaji masalah tersebut lalu mencari jalan keluar terbaik, Pemerintah Desa melibatkan Masyarakat dalam membentuk kebijakan atas dasar kesepakatan bersama dan musyawarah. Formulasi kebijakan sudah pernah dilakukan di Desa Baru Sungai Medang namun belum optimal, salah satunya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia.

Adopsi Kebijakan

Kebijakan Pemerintah Desa dalam mengadopsi kebijakan merupakan tahapan ketiga yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan publik, adopsi ini bertujuan untuk memberikan otorisasi atau kuasa pada jalannya proses dasar pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi berupa (1) Mengidentifikasi alternatif kebijakan, (2) Pengidentifikasian kriteria untuk menilai alternatif yang akan direkomendasikan, dan (3) Mengevaluasi alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria yang relevan.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Kadus Beringin Jaya, ketika diwawancara beliau menyampaikan:

“Untuk menetapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat, Kami melibatkan Masyarakat Dalam penetapannya karena partisipasi masyarakat Desa Baru Sungai Medang sangat diperlukan agar penerapan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, karena masyarakat lebih tau apa yang mereka butuhkan, namun kami tetap menyerahkan keputusan tersebut pada Pemerintah untuk disetujui atau tidak nya”. “Memilih kebijakan harus sesuai dengan keadaan, harus sesuai dengan keinginan masyarakat dan juga harus benar-benar diperlukan dan dibutuhkan masyarakat”.

Kemudian ditambahkan lagi oleh Sekretaris Desa, ketika diwawancara beliau mengatakan:

“Sistemnya cukup efektif, dalam Memilih kebijakan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa Baru Sungai Medang selalu melibatkan banyak orang dalam hal ini masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya, memilih kebijakan juga dilihat dari seberapa tinggi tingkat kepentingan dan juga berdasarkan musyawarah bersama masyarakat dan Pemerintah Desa”. “Yang pasti dalam memilih kebijakan yang paling utama harus sesuai dengan anggaran dan juga kesepakatan bersama”.

Hal senada juga disampaikan oleh Kadus Tanjung Karang, ketika diwawancara beliau mengatakan:

“Dalam sistem pemilihan kebijakan pemberdayaan masyarakat di Desa Baru Sungai Medang , harus sesuai dengan kesepakatan bersama dan harus sesuai dengan aturan yang di tetapkan”. “Kriteria dalam Memilih kebijakan pemberdayan masyarakat Desa Baru Sungai Medang, kebijakan tersebut harus berdasarkan kepentingan masyarakat”.

Dari hasil pengamatan peneliti dan juga wawancara di atas bahwa, setiap kegiatan-kegiatan yang ada termasuk tentang pembuatan kebijakan, semua itu tidak terlepas dari campur tangan masyarakat. Selanjutnya menurut salah seorang warga, ketika diwawancara beliau menyampaikan:

“Sistem Pemerintah Desa Baru Sungai Medang Dalam memilih kebijakan pemberdayaan masyarakat cukup baik, karena kebijakan tersebut tidak jauh-jauh dari keinginan banyak masyarakat”. “Menurut saya mengadopsi kebijakan haruslah yang memang penting dan dibutuhkan masyarakat.”

Dalam hal ini, sesuai dengan hasil observasi peneliti bahwa jawaban para pembuat kebijakan atau pemerintah desa disetujui oleh masyarakat, karena berdasarkan hasil pengamatan peneliti tidak ada yang salah dengan

tahap ketiga kebijakan publik ini. Selanjutnya ditambahkan lagi seorang warga, ketika diwawancara beliau menyampaikan:

“Dalam sistem nya pemerintah mengambil kebijakan dari hal yang termudah terlebih dahulu namun tetap kebijakan tersebut harus di butuhkan masyarakat. Baru setelah itu menentukan kebijakan yang memerlukan waktu atau jangka panjang sejauh ini pemerintah melakukannya dengan baik”. “Untuk mengadopsi kebijakan yang paling utama ialah tingkat nominal kelayakan”.

Menanggapi wawancara diatas, Kaur Pemerintahan Desa Baru Sungai Medang , ketika diwawancara menyampaikan:

“Sistem Pemerintah Desa Baru Sungai Medang , sudah baik dalam memilih kebijakan pemberdayaan masyarakat, karena semua masalah yang ada memang selalu dirundingkan dalam rapat lalu diserahkan lagi kepada lembaga-lembaga yang berwenang untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.”

“Yang utama sekali adalah kebijakan pemberdayaan masyarakat haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan”.

Terakhir, Kepala Desa Baru Sungai Medang , ketika diwawancara beliau menegaskan:

“Dalam memilih kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat, Pemdes bersama dengan tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan organisasi kemasayarakatan desa bermusyawarah untuk memilih kebijakan yang akan di terapkan di Desa Baru Sungai Medang dan sejauh ini masyarakat desa cukup aktif membantu kami dalam membuat kebijakan, sistem yang kami terapkan juga cukup berhasil”. “Dasar utama nya, kebijakan tersebut harus benar-benar dibutuhkan masyarakat”.

Berdasarkan indikator di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa Sistem Adopsi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur cukup efektif dan baik, masyarakat diikutsertakan dalam pemilihan kebijakan yang akan diterapkan, dalam pemilihannya, kebijakan yang menurut Pemerintah Desa dan masyarakat mendesak akan didahulukan lalu berlanjut lagi dengan kebijakan-kebijakan lain yang menurut musyawarah bersama harus didahulukan dalam hal ini pemerintah bersama masyarakat memilih kebijakan yang terpenting terlebih dahulu, setelah memilih kebijakan selanjutnya putusan akhir diserahkan lagi kepada pemerintahan. Hal terpenting dalam memilih kebijakan haruslah sesuai dengan peraturan yang ada, kebijakan tersebut harus dapat menyelesaikan masalah yang ada dan juga harus ada kesepakatan bersama.

Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan publik dimaksud sebagai proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Implementasi juga merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan . artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Seperti halnya yang disampaikan oleh, Sekretaris Desa Baru Sungai Medang, dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“Pelaksanaan/penerapan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang kami lakukan, selalu melibatkan masyarakat dan alhamdulillah masyarakat cukup aktif membantu kami”. “Dalam menerapkan kebijakan yang pertama yang kami lakukan yaitu mengatur/mengelola anggaran dengan baik selanjutnya berbagi tugas/ mengurus kepanitiaan agar kebijakan pemberdayaan masyarakat terkelola dengan baik”.

Kemudian ditambahkan oleh Kadus Beringin Jaya menyampaikan:

“Pada tahap ini penerapan kebijakan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada agar semuanya tertata dan tidak amburadul sehingga kebijakan pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai keinginan masyarakat Desa Baru Sungai Medang ”. “Dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan sesuai prosedur yang ada, yang pertama kali dilakukan menyesuaikan anggaran selanjutnya menetapkan waktu pelaksanaan”.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di atas bahwa dalam menerapkan kebijakan, pemerintah desa mengikut sertakan masyarakat untuk ikut terlibat dalam menyukseskan kebijakan yang diterapkan. Menurut seorang warga ketika diwawancara menyampaikan :

“Kebijakan yang dirumuskan belum diterapkan sepenuhnya namun Penerapan kebijakan yang telah dilakukan cukup baik, masyarakat Desa yang mengikuti kebijakan tersebut menerimanya dengan baik dan juga antusias, namun tidak punya cukup persiapan dalam menangani masalah masyarakat yang membludak.” “Dalam hal penerapan/pelaksanaannya Pemerintah Desa Baru Sungai Medang harus punya persiapan yang matang dalam menghadapi kejadian tak terduga.”

Hasil observasi peneliti dan wawancara di atas menunjukkan dalam implementasi kebijakan ini pemerintah desa masih belum cukup baik karena kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, belum diterapkan sepenuhnya. Hal senada juga disampaikan oleh warga lainnya:

“Dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa Baru Sungai Medang melakukannya dengan baik dan teratur, namun Pemdes tidak punya persiapan dalam handle segala bentuk masalah saat sudah diterapkan, karena sering terjadi perdebatan antar masyarakat yang berebut ingin ikut serta, dalam hal ini pemdes tidak cukup adil dalam memilih masyarakat yang berkeinginan mengikuti program tersebut.” “Tahapan yang pertama tentu mempelajari kelayakan kebijakan, selanjutnya proses dengan sistem di aplikasikan/ diterapkan secara nyata menurut yang telah direncanakan dan juga tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu harus tepat sasaran”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tidak berjalan maksimal karena kurangnya persiapan yang mengakibatkan kebijakan pemberdayaan tersebut tidak sepenuhnya terserap masyarakat. Selanjutnya pernyataan di atas dipertegas oleh Kaur Pemerintahan:

“Dalam penerapan kebijakan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa Baru Sungai Medang sudah cukup baik dan adil mengurus semuanya sesuai dengan prosedur yang ada walaupun sering terjadi kendala yang tidak diinginkan, kami dapat segera mengatasinya dan untuk tahun ini sedang dalam tahap akan dilaksanakan atau tahap implementasi”. “Masalah tahapan penerapan kebijakan pemberdayaan masyarakat ini kami Pemerintah Desa menyesuaikan dengan prosedur yang ada, agar semua berjalan lancar”.

Kemudian ditambahkan oleh Kadus Tanjung Karang. Beliau menyampaikan:

“Penerapan kebijakan pemberdayaan masyarakat Desa Baru Sungai Medang terlaksana sebagai mana mestinya hanya saja masih ada beberapa kebijakan yang belum dilaksanakan karena terkendala masalah waktu dan anggaran yang belum direalisasikan pemerintah”. “Dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan masyarakat, anggaran harus disesuaikan terlebih dahulu”.

Kemudian, ditambahkan seorang masyarakat, mengatakan:

“Dalam menerapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dengan sistem pemberdayaan yang direncanakan agar penerapan tersebut berjalan baik dan sejauh ini Pemdes sudah cukup baik menangani hal tersebut”. “Dalam menerapkan kebijakan ini pemerintah desa melakukan rapat untuk menyesuaikan anggaran dan mengikut sertakan masyarakat untuk bermusyawarah menentukan langkah apa yang dilakukan selanjutnya”.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa persiapan Pemerintah desa dalam menerapkan kebijakan pemberdayaan masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi agar masalah-masalah yang sering terjadi tidak terulang lagi. Kemudian Kaur Kemasyarakatan menyampaikan:

“Penerapannya berjalan sesuai dengan yang telah kami rencanakan sebelumnya, karena sebelum diterapkan kami sudah merancang terlebih dahulu, dari mulai anggaran dan juga hal lainnya”. “Ada beberapa hal yang kami lakukan yaitu mengadakan rapat bersama tokoh-tokoh masyarakat desa agar mereka ikut andil dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ini, lalu membagi tugas agar pelaksanaannya berjalan baik”.

Hal senada disampaikan warga lainnya:

“Masalah penerapan kebijakan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa memang selalu mengadakan rapat dahulu untuk membahas atau menyusun prosedur dan juga langkah apa yang akan

diambil selanjutnya bersama kami masyarakat”. “Ada beberapa tahapan seperti menyusun anggaran yang sudah disiapkan kemudian membagi tugas, sehingga baik Pemerintah Desa Baru Sungai Medang maupun masyarakat bisa ikut berpartisipasi mengurus kebijakan tersebut”.

Selanjutnya dipertegas oleh Kepala Desa, ketika diwawancara beliau menegaskan:

“Penerapan kebijakan pemberdayaan masyarakat Desa Baru Sungai Medang berjalan sesuai dengan peraturan/ketetapan dari pemerintah kabupaten di serahkan kepada pihak desa bekerja sama dengan masyarakat. Dalam menerapkan kebijakan di butuhkan waktu yang bertahap dan tidak bisa sekaligus, sehingga Kebijakan yang tidak terlalu mendesak dikesampingkan dahulu, namun pasti akan tetap dilaksanakan”. “Tahapan nya dibuat saat diadakan rapat, biasanya kami Pemerintah Desa Baru Sungai Medang membagi tugas agar kebijakan terlaksana tepat waktu seperti yang yang telah disepakati”.

Berdasarkan uraian diatas hasil wawancara dengan informan, peneliti menarik kesimpulan jika Implementasi Kebijakan Pemberdayaan masyarakat di Desa Baru Sungai Medang belum cukup baik karena ada banyak kebijakan pemberdayaan yang sudah dirumuskan dan dipilih akan tetapi belum juga diterapkan oleh pemerintah desa. Namun, kebijakan yang telah diterapkan dikatakan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dari pemerintah, dimana pihak desa bekerja sama dengan masyarakat dalam penerapan kebijakan, akan tetapi ada banyak hal yang dikeluhkan masyarakat, salah satunya bahwa Pemerintah Desa kurang sigap dalam menanggapi permasalahan saat kebijakan telah diterapkan. Dalam hal ini persiapan pemerintah desa dalam menerapkan kebijakan pemberdayaan masih kurang.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan berfungsi sebagai pemberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Selanjutnya evaluasi juga memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

Berdasarkan indikator Evaluasi Kebijakan, sesuai dengan hasil wawancara dengan Kaur Kemasyarakatan menyampaikan:

“Sejauh ini penerapan pemberdayaan masyarakat di Desa Baru Sungai Medang Yang sudah dilaksanakan belum mendapati kendala yang serius semuanya berjalan dengan lancar dan masyarakat belajar dengan cepat sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Masyarakat bekerja sama dengan baik.”

Saat ditanya tentang pencapaian, beliau melanjutkan :

“Saat ini belum ada pencapaian dalam bentuk fisik, tetapi masyarakat yang mengikuti kebijakan tersebut sudah cukup merasa puas dengan kebijakan yang sudah diterapkan”.

Hasil dari pengamatan peneliti dan juga wawancara diatas bahwa, memang sering terjadi masalah dalam penerapan kebijakan pemberdayaan. Ini juga disampaikan oleh Kadus Tanjung Karang:

“Sampai saat sekarang ini kebijakan pemberdayaan masyarakat Desa Baru Sungai Medang yang sudah dilaksanakan berjalan sesuai yang di harapkan Pemerintah Desa.” “Untuk saat ini kesenangan masyarakat merupakan pencapaian tersendiri untuk Pemerintah Desa Baru Sungai Medang ”.

Kemudian ditambahkan oleh Kadus Beringin Jaya ketika diwawancara beliau mengatakan:

“Penerapannya sudah cukup baik, karena banyak masyarakat yang sekarang sedikit demi sedikit membaik dalam ilmu pengetahuannya setelah mengikuti berbagai kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Baru Sungai Medang ”. “Pencapaian yang didapat Tentunya ada, karena dengan adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat ini dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat”.

Menurut salah seorang warga:

“Penerapannya tidak terlau baik karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui persoalan ada atau tidaknya kebijakan pemberdayaan yang diterapkan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya,

hanya segelintir orang yang tau. Dan sistem penerapan juga tidak begitu baik karena Pemerintah Desa masih kurang tanggap dalam menghadapi kendala setelah penerapan kebijakan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan”. “Pencapaiannya yaitu Pemerintah Desa Baru Sungai Medang sudah dapat melihat perubahan masyarakat yang mengikuti kebijakan tersebut sebelum dan sesudah dilaksanakannya kebijakan”.

Hal senada disampaikan oleh warga lainnya, mengatakan:

“Penerapan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang sudah di laksanakan cukup baik, namun belum cukup untuk memberdayakan masyarakat secara menyeluruh. tentang sistem penerapan kebijakan, Pemerintah Desa Baru Sungai Medang hanya perlu persiapan yang baik dalam menghadapi masyarakat Desa Baru Sungai Medang saat diterapkannya kebijakan tersebut”. “Tentu saja sudah ada pencapaian yang didapat Pemerintah Desa walaupun tidak menyeluruh, setidaknya ibu-ibu rumah tangga sekarang tidak hanya mengurus rumah melainkan ada kegiatan yang bisa mereka lakukan”.

Lain halnya dengan yang disampaikan seorang warga masyarakat, ketika ditanya beliau berpendapat:

“Kebijakan tersebut cukup membantu, namun sistem Penerapan kebijakan pemberdayaan masyarakat tersebut harus lebih jelas dan nyata, sehingga masyarakat awam bisa lebih mudah memahami pencapaian dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa Baru Sungai Medang.” “Jika kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan, ada kepuasan tersendiri bagi Pemerintah Desa Baru Sungai Medang dan masyarakat karena kebijakan pemberdayaan masyarakat sangat membantu masyarakat”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, penerapan kebijakan di Desa Baru Sungai medang memang sering terjadi masalah yang tidak diinginkan, yang membuktikan bahwa persiapan penerapannya tidak cukup baik. Hal ini dipertegas oleh Sekretaris Desa menegaskan:

“Sejauh ini cukup bagus, mengurangi masalah yang ada, karena masyarakat Desa Baru Sungai Medang menyambut kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan baik dan mereka merasa terpuaskan, walaupun sering kali terjadi perdebatan antar masyarakat namun Pemerintah Desa bisa mengatasinya dan persoalan banyak masyarakat yang tidak tahu tentang kebijakan yang telah diterapkan ini kami akan memperbaiki hal ini untuk kedepannya”. “Pencapaian yang terlihat jelas yaitu dari masyarakat Desa Baru Sungai Medang itu sendiri yang mengikuti program pemberdayaan masyarakat yang perlahan menjadi cukup terampi”.

Selanjutnya, seorang warga masyarakat mengatakan:

“Saat ini, pencapaian yang di dapat Pemerintah Desa Baru Sungai Medang dalam penerapan kebijakan pemberdayaan masyarakat dapat mengurangi pengangguran pada ibu-ibu rumah tangga”.

Kemudian Kaur Pemerintahan, menyampaikan:

“Masalah pencapaian Pemerintah Desa Baru Sungai Medang Sudah cukup puas melihat perkembangan pada masyarakat desa ”.

Ditegaskan lagi oleh Kepala Desa, beliau menyampaikan:

“Sejauh ini kebijakan pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Desa Baru Sungai Medang sudah dapat menyelesaikan persoalan yang ada, walaupun terjadi beberapa kendala namun dapat segera diatasi”. “Tujuan utama penerapan kebijakan pemberdayaan ini yaitu mensejahterakan masyarakat dan sejauh ini kebijakan tersebut dapat sedikit membantu masyarakat dalam perekonomian”.

Berdasarkan uraian di atas hasil wawancara dengan informan, menurut analisis peneliti bahwa indikator Evaluasi kebijakan pemberdayaan yang sejauh ini diterapkan belum cukup atau mampu memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam sistem penerapan kebijakan yaitu persiapan sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Pemerintah desa harus menerapkan kebijakan yang ada secara adil dan merata. Kebijakan Pemerintah Desa tidak hanya berputar pada satu kebijakan saja melainkan ada banyak kebijakan pemberdayaan yang harus diterapkan sesuai dengan perumusan yang ada.

Melalui evaluasi kebijakan ini saya dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu kebijakan yang diterapkan sejauh ini belum dapat menyelesaikan masalah yang ada dan dengan ini Pemerintah desa dapat mengkaji sistem penerapannya agar kebijakan yang akan datang berjalan lebih baik dari pada sebelumnya. Penerapan kebijakan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Baru Sungai Medang belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Tujuan utama dalam penerapan kebijakan pemberdayaan masyarakat yaitu mensejahterakan Masyarakat Juga Membangun masyarakat Desa agar lebih maju, sebab pembangunan tidak hanya berupa pembangunan fisik saja melainkan mencakup segala aspek kehidupan masyarakat desa baik itu, kehidupan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan maupun sumber daya manusia dalam hal ini Pemberdayaan Masyarakat.

SIMPULAN

Penyusunan Agenda, sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, dimana masyarakat Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur ikut berpartisipasi dalam menyusun agenda kebijakan, masalah-masalah yang disampaikan masyarakat kepada BPD ditindak lanjuti untuk masuk kedalam agenda kebijakan, Namun masih belum memuaskan masyarakat karena masih ada kebijakan yang belum terealisasi. Dari segi formulasi kebijakan, Pemerintah Desa Baru Sungai Medang membentuk kebijakan pemberdayaan masyarakat berdasarkan masalah-masalah yang ada. Formulasi kebijakan sudah pernah dilakukan tetapi belum optimal. Salah satunya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia. Untuk adopsi kebijakan, Sistem Adopsi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur cukup efektif dan baik, masyarakat dikutsertakan dalam pemilihan kebijakan yang akan diterapkan, dalam pemilihannya, kebijakan yang mendesak akan didahulukan. Sementara itu, implementasi kebijakan, belum cukup baik karena ada banyak kebijakan pemberdayaan yang sudah dirumuskan dan dipilih akan tetapi belum juga diterapkan oleh pemerintah desa. Namun, kebijakan yang telah diterapkan dikatakan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dari pemerintah, dimana pihak desa bekerja sama dengan masyarakat dalam penerapan kebijakan, akan tetapi ada banyak hal yang dikeluhkan masyarakat, salah satunya bahwa Pemerintah Desa kurang sigap dalam menanggapi permasalahan saat kebijakan telah diterapkan. Pada tataran evaluasi kebijakan, sejauh ini diterapkan belum mampu memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam sistem penerapan kebijakan yaitu persiapan sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Pemerintah desa harus menerapkan kebijakan secara adil dan merata. Kebijakan Pemerintah Desa tidak hanya berputar pada satu kebijakan saja melainkan ada banyak kebijakan pemberdayaan yang harus diterapkan sesuai dengan perumusan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Chr, Jimmy, L. Goal. 2008. *Sisitem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Grafindo
- Dubrin, Andrew J. 2005. *Leadership (terjemahan)*. Edisi Kedua. Jakarta : Preneda Media
- Harahap, Sofyan Safri. 2004. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hikmat, Hary. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora
- Komaruddin. 2001. *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi ke-5. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardikanto, Totok. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Najiati, Sri, dkk. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands Internasional.
- Narimawati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori & aplikasi*. Jakarta: Agung Media
- Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat meningkatkan Produktivitas kerja*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sugiyono. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&d*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

- Suparjan, dan Hempri Suyanto. 2003. *Pengebangan Masyarakat: Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Tampubolon, Mangatas. 2006. *Penddikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*.
- Ulumiyah, Ita., Gani, Abdul Juli Andi., Mindarti, Lely Indah. (2013). *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)*. 1(5). 890-899.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Edisi & revisi terbaru. Yogyakarta: Media Presindo.